

# **Strategi Kebijakan Kewirausahaan Daerah :**

## **Instrumen Implementasi & Insentif untuk Memantik Partisipasi Lokal**

Vini Rizky Permatasari  
Luffi Septian  
Universitas Galuh, Indonesia  
Email: [Vini.rizky@student.unigal.ac.id](mailto:Vini.rizky@student.unigal.ac.id)  
Preprint, 2026  
VIII + 154 Halaman, 15,5 cm x 23 cm  
© *All Rights Reserved*

### **ABSTRAK**

Pengembangan kewirausahaan daerah menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya integrasi antar instrumen kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berbasis dampak untuk meningkatkan efektivitas pengembangan kewirausahaan di tingkat daerah.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan strategi kebijakan kewirausahaan daerah yang terintegrasi melalui pendekatan konseptual dan analitis. Pembahasan mencakup berbagai instrumen kebijakan, antara lain insentif fiskal dan nonfiskal, akses pembiayaan, pengadaan publik, kebijakan local content, serta program inkubasi dan pendampingan usaha. Selain itu, aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem jaminan mutu juga menjadi fokus utama dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kewirausahaan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara instrumen kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan yang mengintegrasikan insentif, pembiayaan, akses pasar, dan pendampingan terbukti mampu meningkatkan daya saing usaha lokal serta memperluas dampak ekonomi yang dihasilkan.

Kesimpulannya, kebijakan kewirausahaan daerah perlu dirancang secara holistik dan adaptif dengan menekankan pada outcome yang terukur, inklusivitas, serta keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkeadilan.

**Kata kunci:** kewirausahaan daerah, kebijakan publik, UMKM, pembiayaan, pengembangan ekonomi lokal.

# ABSTRACT

The development of regional entrepreneurship has become a key strategy in promoting inclusive and sustainable local economic growth. However, policy implementation often faces various challenges, including limited access to financing, low human resource capacity, and lack of integration among policy instruments. Therefore, a comprehensive and impact-oriented policy approach is required to enhance the effectiveness of entrepreneurship development at the regional level.

This study aims to examine and formulate regional entrepreneurship policy strategies through a conceptual and analytical approach. The discussion covers various policy instruments, including fiscal and non-fiscal incentives, access to financing, public procurement, local content policies, as well as business incubation and mentoring programs. In addition, strengthening human resource capacity, the use of technology, and quality assurance systems are emphasized as key factors supporting successful policy implementation.

The findings indicate that the effectiveness of regional entrepreneurship policies depends on the synergy among policy instruments, institutional capacity, and stakeholder involvement. An integrated approach combining incentives, financing, market access, and mentoring has been shown to improve the competitiveness of local businesses and expand their economic impact.

In conclusion, regional entrepreneurship policies should be designed in a holistic and adaptive manner, emphasizing measurable outcomes, inclusiveness, and sustainability. Thus, policy functions not

only as a regulatory tool but also as a strategic instrument to drive competitive and equitable regional economic growth.

**Keywords:** regional entrepreneurship, public policy, SMEs, financing, local economic development.

# **Strategi Kebijakan Kewirausahaan Daerah:**

## **Instrumen Implementasi & Insentif untuk Memantik Partisipasi Lokal**

### **Insentif fiskal dan nonfiskal untuk pelaku usaha**

Insentif fiskal merupakan instrumen kebijakan yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan perilaku pelaku usaha menuju tujuan pembangunan ekonomi lokal, namun harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas penerimaan daerah (OECD, 2020; World Bank, 2021). Keringanan pajak kondisional—misalnya potongan retribusi atau pajak daerah bagi usaha yang mempekerjakan tenaga kerja lokal—dapat menghubungkan keuntungan fiskal dengan outcome sosial yang terukur. Desain kondisionalitas perlu mencakup target yang jelas, periode pengukuran, serta mekanisme verifikasi yang transparan agar menghindari moral hazard (Mazzucato, 2021). Selain itu, insentif fiskal sebaiknya bersifat temporer untuk mendorong transisi usaha menuju kemandirian fiskal. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa biaya fiskal sebanding dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Di sisi nonfiskal, kemudahan layanan administratif merupakan insentif penting yang sering kali lebih berdampak bagi usaha mikro dibandingkan insentif fiskal (OECD, 2020). Layanan satu pintu, digitalisasi perizinan, dan penyederhanaan prosedur terbukti mampu menurunkan biaya transaksi yang menjadi hambatan utama bagi usaha kecil (World Bank, 2021). Kemudahan layanan juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengurangi praktik informal. Namun demikian, desain layanan harus tetap mempertimbangkan keterbatasan literasi digital pelaku usaha agar inklusivitas tetap terjaga (Sukmara, 2025).

Penghargaan dan pengakuan publik merupakan bentuk insentif nonfiskal yang efektif dalam meningkatkan motivasi dan reputasi pelaku usaha (Bovaird & Löffler, 2021). Sertifikasi, label produk lokal,

atau penghargaan tahunan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka akses pasar yang lebih luas. Dalam perspektif perilaku organisasi, pengakuan sosial terbukti meningkatkan komitmen dan kinerja individu maupun kelompok (Saepudin et al., 2024; Sukmara, 2025). Oleh karena itu, mekanisme penghargaan perlu dirancang secara transparan dan berbasis kinerja agar kredibilitasnya terjaga.

Insentif administratif yang dipadukan dengan akses fasilitas teknis merupakan strategi nonfiskal yang efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha lokal. Penyediaan fasilitas bersama seperti laboratorium uji mutu, mesin produksi, dan pelatihan teknis dapat menurunkan hambatan peningkatan kualitas produk (World Bank, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan sumber daya manusia yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dalam mendorong produktivitas (Rahman et al., 2023; Sukmara, 2024). Dengan dukungan fasilitas teknis yang memadai, pelaku usaha lebih mampu memenuhi standar pasar dan meningkatkan daya saing.

Insentif fiskal perlu mengandung elemen pembagian risiko untuk meningkatkan daya tarik investasi sosial bagi sektor swasta. Skema seperti tax credit berbasis kinerja atau mekanisme clawback dapat mengurangi moral hazard dan memastikan bahwa insentif diberikan berdasarkan pencapaian outcome (Mazzucato, 2021; OECD, 2021). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus menjaga akuntabilitas kebijakan. Evaluasi berbasis kinerja menjadi penting untuk memastikan bahwa insentif memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Insentif nonfiskal berbasis akses pasar, seperti prioritas dalam pengadaan publik atau promosi melalui platform pemerintah, memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pelaku usaha lokal tanpa membebani anggaran secara signifikan (World Bank, 2021). Kebijakan ini memungkinkan terciptanya permintaan awal yang stabil sehingga usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Namun implementasinya harus disertai dengan mekanisme

transparansi untuk menghindari distorsi pasar dan praktik tidak sehat (OECD, 2020).

Insentif kombinasi—menggabungkan fiskal, administratif, dan akses pasar—sering kali memberikan hasil paling kuat karena menyentuh berbagai hambatan secara simultan. Paket insentif yang terpadu misalnya potongan retribusi selama dua tahun, prioritas pengadaan, dan paket pelatihan teknis membuat usaha kecil punya ruang bernapas untuk meningkatkan kapasitas. Perencanaan paket ini harus berbasis analisis kebutuhan lokal agar sumber daya publik difokuskan pada hambatan terbesar. Desain paket perlu mempertimbangkan sequencing intervensi: dukungan teknis idealnya diberikan sebelum insentif fiskal habis agar usaha mampu sustain. Mekanisme monitoring bersama antar-dinas memperkuat koordinasi implementasi paket. Selain itu, formula paket bisa divariasikan menurut sektor unggulan lokal. Evaluasi dampak paket akan menunjukkan kombinasi mana yang paling cost-effective. Pendekatan terintegrasi meningkatkan chance bahwa insentif menumbuhkan dampak yang tahan lama.

Kebijakan insentif juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan sehingga manfaat tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Skema preferensi untuk usaha mikro dan kelompok rentan—seperti prioritas pengadaan atau pengurangan retribusi bertahap—dapat memperkecil kesenjangan. Namun mekanisme verifikasi elegan diperlukan agar tidak terjadi capture oleh jaringan kelompok dominan. Pemerintah daerah dapat menetapkan kuota partisipasi atau persyaratan inklusi sebagai syarat mendapatkan insentif. Data terdisagregasi menurut gender, lokasi, dan ukuran usaha membantu pemantauan distribusi manfaat. Selain itu, insentif yang mendorong keterlibatan perempuan atau pemuda memberi efek multiplikator sosial yang tinggi. Keadilan dalam pemberian insentif adalah prasyarat legitimasi politik dan sosial. Tanpa perhatian ini, program insentif berisiko memperlebar kesenjangan lokal.

Mekanisme administrasi insentif perlu sederhana dan cepat untuk mengurangi biaya kepatuhan. Prosedur aplikasi yang panjang dan persyaratan dokumen berlapis membuat usaha kecil enggan mengakses program. Oleh karena itu, form aplikasi ringkas, prasyarat minimal, dan layanan asistensi pengajuan merupakan komponen penting. Pemerintah dapat menyiapkan petugas penghubung yang membantu usaha menyiapkan dokumentasi serta memfasilitasi proses verifikasi. Selain itu, pemanfaatan sistem elektronik dapat mempercepat penilaian klaim insentif dan meminimalkan peluang praktik tidak sah. Namun sistem elektronik harus disertai opsi offline bagi pelaku yang belum tertangkap digital. Waktu tanggap yang terukur juga menjadi indikator kualitas layanan insentif. Dengan administrasi yang efisien, program insentif lebih mudah diakses oleh target yang diinginkan.

Mekanisme audit dan akuntabilitas terhadap pemberian insentif wajib ada agar anggaran publik tidak disalahgunakan. Audit internal dan eksternal perlu memastikan bahwa penerima insentif memenuhi komitmen yang ditetapkan. Selain itu, publikasi daftar penerima dan hasil verifikasi meningkatkan transparansi dan memperkecil peluang nepotisme. Mekanisme clawback perlu diatur untuk kasus di mana penerima gagal memenuhi target—misalnya pengembalian sebagian insentif atau pembatalan fasilitas. Namun proses penegakan harus proporsional dan menimbang kapasitas usaha agar tidak mematikan inisiatif kecil. Peran LSM dan media lokal bisa menjadi mitra pengawas yang memperkaya kontrol sosial. Akuntabilitas yang kuat menjaga efektivitas jangka panjang program insentif.

Insentif juga harus disesuaikan dengan siklus usaha dan musim sektor lokal—terutama sektor agraris yang memiliki fluktuasi musiman. Skema potongan retribusi atau bantuan modal kerja perlu sinkron dengan periode produksi dan pemasaran agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas. Program kredit bergulir dengan tenor yang sesuai siklus usaha akan lebih efektif daripada insentif tunggal. Pemerintah harus menyediakan panduan spesifik untuk masing-masing subsektor agar desain insentif tepat sasaran. Selain itu, sistem

monitoring harus menangkap dinamika musiman agar dukungan disalurkan pada waktu yang paling berdampak. Dengan penyesuaian temporal, insentif menjadi alat yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil pelaku usaha.

Komunikasi program insentif yang efektif menjadi faktor penentu partisipasi; tanpa sosialisasi yang memadai, manfaat program tidak akan terserap optimal. Pemerintah daerah harus menyusun strategi komunikasi multi-kanal: radio lokal, pertemuan desa, papan informasi pasar, serta kanal digital untuk menjangkau spektrum pelaku usaha. Materi sosialisasi harus menggunakan bahasa sederhana dan contoh praktis sehingga mudah dimengerti. Selain itu, sesi tanya jawab langsung dan layanan bantuan membuat pelaku lebih percaya untuk mendaftar. Penggunaan duta lokal atau perangkat BUMDes dapat memperluas jangkauan komunikasi. Evaluasi efektivitas komunikasi membantu menyesuaikan pesan agar lebih relevan. Komunikasi yang baik meningkatkan transparansi dan partisipasi.

Pemberdayaan kelembagaan lokal yang mengelola insentif—seperti unit layanan terpadu atau desk pengembangan UMKM—membutuhkan kapasitas teknis dan anggaran operasional. Unit ini harus dilengkapi prosedur operasi standar, sistem informasi pelacakan manfaat, dan SDM yang kompeten. Investasi pada unit pengelola sering kali memberikan ROI tinggi karena meningkatkan efektivitas penyaluran insentif. Selain itu, kolaborasi antara unit ini dengan universitas, LSM, dan perbankan memperkaya layanan bagi penerima. Penguatan kelembagaan membantu menjaga konsistensi program di tengah perubahan kepemimpinan politik. Dengan institusi lokal yang kuat, program insentif bisa menjadi instrumen jangka panjang bagi pembangunan.

Ringkasnya, kombinasi insentif fiskal dan nonfiskal yang terukur, adil, dan mudah diakses menjadi katalis utama dalam memantik partisipasi lokal. Desain insentif harus berbasis bukti, difokuskan pada hambatan utama, dan dievaluasi berkala untuk memastikan cost-effectiveness. Integrasi insentif dengan perizinan bersyarat, paket

dukungan teknis, dan akses pasar memperbesar peluang dampak nyata. Transparansi, akuntabilitas, dan inklusi menjadi prinsip operasional agar manfaat program dirasakan luas. Dengan strategi insentif yang matang, perizinan dapat berubah dari formalitas menjadi motor penggerak kesejahteraan.

### **Skema pembiayaan dan revenue-sharing**

Skema pembiayaan yang tepat merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan kewirausahaan daerah, karena keterbatasan akses modal sering menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha lokal (World Bank, 2022). Model pembiayaan seperti blended finance, pooled fund, dan microfinance dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya finansial sekaligus mengurangi risiko investasi (OECD, 2021). Selain itu, pendekatan pembiayaan berbasis hasil seperti social impact bonds mendorong efisiensi karena pembayaran dikaitkan dengan pencapaian outcome yang terukur (Mazzucato, 2021).

Pembiayaan mikro merupakan instrumen penting dalam mendukung pengembangan usaha kecil, terutama dalam meningkatkan akses terhadap modal bagi pelaku usaha yang belum memiliki agunan formal (World Bank, 2022). Skema kredit mikro yang disesuaikan dengan siklus usaha dan kapasitas pembayaran terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha (Rahman et al., 2023). Selain itu, integrasi antara pembiayaan dan pelatihan manajemen keuangan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana serta mengurangi risiko kredit macet (Sukmara, 2024).

Obligasi sosial (social impact bonds) dan kontrak berbasis hasil memberi alternatif pembiayaan yang memindahkan risiko ke investor swasta yang mencari hasil berdampak. Dalam struktur ini, investor awal menutup biaya program, dan pemerintah membayar kembali (plus hasil) hanya jika indikator outcome tercapai. Mekanisme ini mendorong fokus pada desain program yang efektif karena pembayaran bergantung pada hasil terverifikasi. Obligasi sosial cocok

untuk intervensi yang berbasis outcome terukur seperti penyerapan tenaga kerja lokal atau kenaikan pendapatan. Namun kompleksitas kontrak dan biaya verifikasi membuat instrumen ini lebih cocok untuk proyek skala menengah ke atas. Pemerintah daerah bisa memulai pilot bersama donor untuk membangun kapasitas mekanisme ini. Transparansi aliran dana dan peran verifikator independen menjadi prasyarat. Dengan struktur yang benar, pembiayaan berbasis hasil memberikan leverage modal swasta untuk proyek sosial.

Model revenue-sharing menjadi solusi pragmatis ketika proyek komersial menghasilkan arus kas yang dapat dibagi antara investor dan komunitas. Mekanisme bagi hasil perlu dituangkan dalam kontrak yang menetapkan proporsi, frekuensi pembayaran, dan mekanisme audit. Pembagian yang adil mendorong kepercayaan dan partisipasi komunitas karena keuntungan dibagikan langsung. Selain itu, bagi hasil dapat dipakai sebagai basis pengembalian modal investasi yang membuat proyek lebih mudah dibiayai. Penting memisahkan alokasi keuntungan untuk reinvestasi komunitas, pembayaran dividen, dan dana cadangan sehingga keberlanjutan terjaga. Mekanisme perpajakan juga harus diatur agar tidak menggugurkan insentif pembagian keuntungan. Monitoring kinerja finansial dan audit transparan mengurangi potensi perselisihan. Revenue-sharing memadukan prinsip pasar dengan tujuan redistribusi lokal.

Model dana rotasi (revolving fund) membantu menciptakan sumber modal jangka panjang yang berkelanjutan untuk usaha kecil. Dana awal diberikan sebagai kredit lunak, dan setelah dikembalikan, modal tersebut dipakai lagi untuk pelaku lain. Skema ini efektif bila tingkat pengembalian dijaga dan manajemen dana profesional. Pemerintah daerah atau koperasi dapat mengelola dana rotasi dengan pengawasan ketat untuk memastikan keberlanjutan. Perjanjian peminjaman harus mencakup pelatihan dan pendampingan sehingga kredit digunakan produktif. Dana rotasi juga bisa dikaitkan dengan target dampak sehingga prioritas diberikan kepada inisiatif berbasis outcome. Transparansi data pengembalian membantu menjaga

kepercayaan penyumbang. Dengan tata kelola yang baik, dana rotasi menjadi sumber modal yang resilient.

Skema crowdfunding lokal merupakan alternatif finansial yang memanfaatkan komunitas sebagai sumber modal awal. Platform crowdfunding dapat dikembangkan oleh BUMDes atau lembaga lokal untuk proyek-proyek yang memiliki dukungan masyarakat nyata. Crowdfunding memadukan aspek partisipasi sosial dan validasi pasar karena dukungan finansial menunjukkan permintaan riil. Pemerintah daerah dapat memberi insentif berupa matching fund untuk proyek yang mencapai target crowdfunding tertentu. Namun mekanisme ini perlu regulasi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penipuan. Platform harus transparan tentang penggunaan dana dan target hasil. Crowdfunding juga memfasilitasi keterlibatan diaspora lokal yang ingin berkontribusi. Ketika dikelola baik, crowdfunding memperkuat ownership komunitas terhadap proyek lokal.

Mekanisme blended finance menggabungkan modal publik, filantropi, dan komersial untuk menurunkan risiko dan menarik investasi swasta. Struktur ini memungkinkan proyek yang awalnya terlalu berisiko bagi investor komersial untuk mendapat pembiayaan awal. Pemerintah dapat menempatkan concessional capital atau jaminan untuk menutup sebagian risiko sementara investor swasta memasukkan modal berdasar potensi pasar. Blended finance juga cocok untuk proyek infrastruktur lokal yang belum layak secara komersial pada tahap awal. Tata kelola blended finance harus jelas soal return expectations, mekanisme exit investor, dan alokasi risiko. Kerangka legal dan fiskal perlu memfasilitasi jenis struktur ini agar tidak menimbulkan masalah kepatuhan. Evaluasi risiko dan benefit harus transparan untuk menjaga dukungan publik.

Revenue-sharing dapat disusun sebagai agreement jangka panjang antara corporate dan komunitas, dengan porsi yang meningkat seiring capaian target tertentu. Misalnya, komunitas mendapat persentase pendapatan kotor hingga nilai investasi kembali, kemudian beralih ke skema dividen berkala. Penetapan dasar penghitungan

revenue harus disepakati bersama dan divalidasi oleh auditor independen. Selain pembayaran periodik, bagian revenue dapat dialokasikan untuk dana pembangunan komunitas atau program kesehatan dan pendidikan. Mekanisme alokasi harus dicatat dan dipublikasikan untuk menjamin akuntabilitas. Revenue-sharing yang transparan meminimalkan konflik dan memupuk kepercayaan. Penting juga merancang mekanisme adjustability untuk menghadapi fluktuasi pasar. Dengan struktur bagi hasil yang fair, proyek komersial dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan lokal.

Mekanisme pembiayaan harus memberikan ruang bagi produk keuangan inovatif seperti ekuitas kecil, micro-equity, atau convertible grants yang bisa menjadi jembatan bagi usaha menuju investasi komersial. Micro-equity memberi komunitas kepemilikan modal yang berpotensi menghargai aset mereka. Convertible grants memberi fleksibilitas—transformasi bantuan menjadi ekuitas ketika proyek mencapai milestone tertentu. Instrumen-instrumen ini membutuhkan struktur hukum yang jelas dan advisory support untuk mengelola kepemilikan serta hak suara. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi template kontrak dan dukungan legal untuk mekanisme ini. Pengelolaan hak kepemilikan secara adil mencegah elite capture. Instrumen keuangan inovatif memperluas pilihan pembiayaan di luar utang semata.

Mekanisme jaminan kredit publik menjadi alat penting untuk membuka akses pembiayaan lewat bank komersial bagi usaha yang belum memiliki agunan. Pemerintah daerah bisa menyediakan skema guarantee partial yang menutupi sebagian risiko kredit sehingga bank mau menyalurkan pinjaman. Namun pengelolaan risiko jaminan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan contingent liability yang besar bagi APBD. Kebijakan jaminan kredit harus diiringi dengan penguatan kapasitas bank lokal untuk menilai proyek mikro dan UMKM. Perjanjian jaminan perlu ketentuan klaim yang jelas dan proses recovery yang adil. Skema ini memerlukan mekanisme monitoring

penggunaan kredit agar tujuan produktif tercapai. Jaminan kredit yang efektif memecah hambatan utama akses modal.

Mekanisme pembiayaan perlu menyertakan alur exit dan sustainability sehingga modal awal tidak menjadi subsidi permanen. Model-model pembiayaan harus memiliki horizon kapan dukungan publik akan ditarik secara bertahap. Early stage grants atau concessional loans dapat dikurangi seiring peningkatan kapasitas dan akses pasar. Roadmap exit harus disepakati sejak awal antara penyedia dana dan pelaksana proyek. Selain itu, mekanisme reinvestasi revenue ke dalam skema dana rotasi memperpanjang umur dana publik. Pengaturan exit yang bijak mencegah ketergantungan seumur hidup pada subsidi. Dengan strategi transisi, program menjadi lebih scalable dan replikatif.

Transparansi dana dan laporan keuangan adalah prasyarat untuk menjaga kepercayaan penyumbang dan penerima. Setiap aliran dana harus dapat dilacak dari sumber hingga penggunaan akhir; audit berkala memperkuat pengawasan. Laporan yang mudah diakses publik membantu komunitas memantau apakah manfaat sampai pada mereka. Selain itu, mekanisme feedback dari komunitas atas prioritas penggunaan dana meningkatkan akuntabilitas. Platform digital dapat membantu menyajikan ringkasan anggaran, progress, dan hasil pencapaian. Keterbukaan finansial mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan daya tarik investor yang peduli dampak.

Skema-skema pembiayaan harus dikombinasikan dengan instrumen nonfinansial seperti pelatihan bisnis, akses pasar, dan fasilitasi sertifikasi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan investasi. Pembiayaan tanpa pendampingan sering gagal karena penerima kehabisan kapasitas menjalankan bisnis. Paket pembiayaan + pembinaan meningkatkan kemungkinan pengembalian kredit dan pencapaian target dampak. Mekanisme integrasi antara lembaga keuangan dan unit pemberdayaan lokal memudahkan koordinasi layanan. Evaluasi indikator kinerja finansial dan sosial membantu

mengetahui kombinasi intervensi mana yang paling efektif. Dengan bundle yang tepat, pembiayaan menjadi engine pembangunan lokal.

Singkatnya, desain pembiayaan dan mekanisme revenue-sharing harus fleksibel, transparan, dan terkait kuat dengan tujuan dampak yang diinginkan. Kombinasi instrumen—dana bersama, kredit mikro, obligasi sosial, blended finance, dan revenue-sharing—memberi toolbox bagi pemerintah daerah untuk menanggapi konteks lokal. Pengelolaan yang profesional, jaminan perlindungan komunal, dan mekanisme exit yang jelas menjadi faktor penentu keberhasilan. Ketika pembiayaan selaras dengan paket dukungan nonfinansial, peluang bahwa perizinan menghasilkan kesejahteraan meningkat signifikan. Skema yang berhasil menjadi model yang dapat direplikasi ke wilayah lain.

## **Pengadaan publik & Local Content Requirements**

Pengadaan publik merupakan instrumen kebijakan yang strategis karena pemerintah berperan sebagai pembeli utama yang mampu menciptakan permintaan bagi produk lokal (World Bank, 2021). Dengan mengarahkan belanja publik kepada pelaku usaha lokal, pemerintah dapat memperkuat rantai nilai daerah serta meningkatkan daya saing UMKM. Namun, kebijakan ini harus dirancang secara transparan dan kompetitif untuk menghindari praktik nepotisme serta menjaga efisiensi penggunaan anggaran (OECD, 2020). Selain itu, pengadaan publik yang efektif perlu diintegrasikan dengan program peningkatan kapasitas agar pelaku usaha lokal mampu memenuhi standar kualitas dan volume yang dibutuhkan.

Local Content Requirements (LCR) merupakan kebijakan yang menetapkan tingkat penggunaan sumber daya lokal dalam suatu kegiatan ekonomi guna meningkatkan nilai tambah domestik (OECD, 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak eksternal, tetapi juga

memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian daerah (World Bank, 2021). Namun demikian, penerapan LCR harus dilakukan secara bertahap dan disertai dengan peningkatan kapasitas pelaku lokal agar tidak menimbulkan inefisiensi atau penurunan kualitas produk. Pendampingan teknis dan akses pembiayaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Dalam praktiknya, kombinasi antara pengadaan publik pro-lokal dan LCR bisa dirancang sebagai paket insentif bagi pemegang izin yang berorientasi dampak. Misalnya, pemegang izin yang memenuhi target konten lokal diberi prioritas dalam akses tender atau diberikan skor tambahan dalam evaluasi. Paket semacam ini memotivasi perusahaan untuk membangun rantai pasok lokal sejak tahap perencanaan. Namun pemerintah daerah harus menyiapkan mekanisme verifikasi yang robust untuk menguji klaim penggunaan supplier lokal. Basis data supplier lokal terverifikasi memudahkan proses seleksi dan mengurangi biaya transaksi bagi pengadaan. Sistem pendaftaran supplier yang sederhana dan terstandarisasi meminimalkan kesenjangan informasi. Selain itu, proses pengadaan dapat menyertakan klausul *passing-on benefit* yang mengharuskan perusahaan besar melaporkan subkontrak kepada UMKM setempat. Pelibatan koperasi dan BUMDes sebagai agregator mempermudah alokasi subkontrak ke pelaku mikro. Rangkaian kebijakan ini harus dibangun dengan prinsip keadilan agar tidak melemahkan daya saing.

Perancangan kontrak pengadaan harus mengakomodasi kondisi pasar lokal dan menyediakan mekanisme mitigasi risiko untuk supplier kecil. Ketentuan pembayaran yang cepat dan sebagian di muka membantu menjaga likuiditas pemasok lokal yang rentan. Ketentuan penalti dan sanksi juga harus adil sehingga kontraktor tidak menggunakan kekuasaan pasar untuk menekan pemasok kecil. Kontrak bisa mencantumkan target sosial dan indikator kinerja yang dapat diuji secara periodik. Selain itu, model kontrak yang fleksibel memungkinkan penyesuaian teknis jika supplier lokal membutuhkan waktu untuk meningkatkan kapasitas. Mekanisme kolaboratif antara

kontraktor utama, pemerintah, dan aggregator lokal memperkecil kegagalan rantai pasok. Pemasok kecil juga perlu akses ke fasilitas produksi bersama agar mampu memenuhi volume dan kualitas yang diminta. Pemerintah dapat menyediakan garansi pembayaran atau fasilitas jaminan untuk meminimalkan risiko kredit. Dengan kontrak yang dirancang berpihak pada kemampuan lokal, manfaat pengadaan lebih mudah terealisasi.

Transparansi dan keterbukaan informasi adalah kunci agar pengadaan publik membawa manfaat lokal tanpa disalahgunakan. Portal pengadaan publik yang menampilkan tender, pemenang, nilai kontrak, serta penggunaan supplier lokal meningkatkan akuntabilitas. Publikasi daftar supplier lokal yang telah terverifikasi memudahkan korporasi dan pemerintah mencari mitra yang credible. Selain itu, kanal pengaduan dan mekanisme grievance redress perlu disediakan agar penyimpangan cepat diatasi. Pelibatan masyarakat dalam audit sosial pengadaan menambah dimensi kontrol yang berharga. Data pengadaan yang terbuka juga menyediakan bahan analisis bagi pemangku kebijakan untuk memperbaiki desain ketentuan LCR. Sebagai tambahan, pelatihan bagi staf pengadaan pada pendekatan pro-lokal memastikan proses tender dijalankan kompeten. Keterbukaan data membantu membangun kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas. Dengan transparansi, pengadaan dapat menjadi instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

Pengadaan publik dapat dikemas untuk mendorong inovasi lokal bila pemerintah memberi ruang untuk produk atau jasa bernilai tambah lokal. Misalnya, klausul inovasi lokal atau kriteria nilai tambah lingkungan dapat memberi poin dalam evaluasi tender. Insentif tersebut mendorong pelaku lokal untuk berinovasi dalam desain, pengemasan, atau proses produksi. Pemerintah dapat memfasilitasi inkubasi produk lokal sebelum dimasukkan ke katalog pengadaan. Selain itu, pilot procurement untuk produk baru bisa digunakan sebagai uji pasar yang mengurangi risiko bagi pemasok. Kolaborasi antara dinas pengadaan dan dinas perdagangan untuk mempromosikan produk unggulan daerah

memperkuat efek pengadaan. Dukungan pemasaran pemerintah pada produk yang lolos pengadaan meningkatkan skala dan permintaan. Dengan demikian, pengadaan menjadi katalis inovasi sekaligus pasar permulaan bagi usaha lokal.

Pengaturan preferensi lokal harus seimbang dengan aturan kompetisi agar tidak melanggar prinsip ekonomi yang sehat dan hukum yang berlaku. Preferensi yang berlebihan bisa memicu distorsi pasar dan menurunkan efisiensi anggaran publik. Oleh karena itu, kebijakan preferensi perlu berbasis waktu dan target transisi sehingga pada fase awal ada proteksi sementara diiringi peningkatan kapasitas. Pemerintah juga perlu menyusun kriteria objektif yang mendorong kualitas serta manfaat lokal. Komponen monitoring nilai-for-money harus tetap ada untuk memastikan pembelian lokal tetap memberikan nilai terbaik untuk uang publik. Dengan keseimbangan ini, preferensi lokal menjadi instrumen sementara untuk penguatan kapasitas bukan proteksi abadi. Harmonisasi kebijakan pengadaan dengan peraturan nasional juga penting untuk menghindari konflik regulasi. Rekomendasi teknis dan pedoman operasional membantu petugas pengadaan menerapkan preferensi secara tepat.

Kolaborasi antar-daerah mendorong pembentukan ekosistem pengadaan yang lebih luas sehingga supplier lokal dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Konsorsium pengadaan antar-kabupaten dapat menggabungkan permintaan sehingga membuat investasi pada kapasitas lokal lebih layak. Selain itu, skala permintaan yang lebih besar menarik minat investor untuk menyiapkan fasilitas pengolahan atau logística. Namun kolaborasi ini memerlukan mekanisme koordinasi antar-pemerintah daerah untuk menentukan alokasi manfaat dan pembagian risiko. Perjanjian intergovernmental yang jelas serta mekanisme perhitungan bagi hasil menjadi elemen penting. Konsolidasi permintaan regional dapat menjadi strategi transisi sebelum supplier lokal mampu bersaing di level nasional. Forum kerjasama regional dan sharing platform informasi supplier

membantu mempercepat proses ini. Dengan demikian, pengadaan publik dapat menjadi instrumen desentralisasi ekonomi yang efektif.

Pengembangan kapasitas ekosistem supplier harus berjalan paralel dengan kebijakan pengadaan dan LCR agar upaya supply-side tidak tertinggal. Program pelatihan teknis, manajemen bisnis, dan sertifikasi mutu perlu diintegrasikan dalam paket pengadaan pro-lokal. Fasilitas upgrade teknologi dan akses ke pembiayaan untuk supplier juga menjadi komponen penting. Pemerintah bisa menyediakan bantuan pra-kualifikasi supplier untuk mempercepat proses lelang. Selain itu, pembentukan klaster produksi di sekitar proyek pengadaan mempermudah pengawasan kualitas. Koordinasi antara unit pengadaan dan unit pemberdayaan ekonomi lokal menghasilkan paket yang konsisten. Evaluasi kapabilitas supplier harus menjadi bagian dari proses perencanaan pengadaan. Dengan dukungan supply-side yang kuat, implementasi LCR dan preferensi lokal menjadi lebih feasible.

Evaluasi dampak pengadaan terhadap perekonomian lokal harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektifitas kebijakan. Indikator yang relevan termasuk penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah yang tertahan di daerah, peningkatan omzet supplier lokal, dan distribusi manfaat. Evaluasi yang berbasis data membantu menyesuaikan target LCR dan mekanisme tender. Penggunaan studi dampak ekonomi dan audit sosial memperkaya perspektif hasil. Temuan evaluasi sebaiknya dipublikasikan untuk transparansi dan pengajaran bagi daerah lain. Hasil evaluasi juga menjadi dasar argumentasi politik untuk mempertahankan atau mengubah kebijakan pengadaan. Dengan evidence-based assessment, kebijakan dapat diperbaiki agar membawa manfaat yang lebih besar. Pengadaan yang dievaluasi dengan baik cenderung lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, pengadaan publik dipadukan dengan Local Content Requirements dapat menjadi alat transformasional bila dirancang proporsional, transparan, dan disertai dukungan peningkatan kapasitas. Paket kebijakan harus mendorong permintaan sekaligus

memperkuat penawaran lokal agar efek kesejahteraan nyata. Mekanisme verifikasi, audit, dan partisipasi komunitas penting untuk menjaga akuntabilitas. Selain itu, strategi fase-in, harmonisasi regulasi, dan kolaborasi antar-daerah memperbesar peluang sukses. Ketika pengadaan dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal, bukan sekadar belanja, maka dampaknya menjadi berkelanjutan. Referensi praktis dan teknis perlu disiapkan untuk memandu implementasi di tingkat kabupaten/kota. Pengadaan yang pro-lokal berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memperkuat basis industri mikro. Dengan tata kelola yang matang, pengadaan publik menjadi instrumen kunci dalam agenda perizinan berorientasi dampak.

### **Sistem pembinaan kapasitas & inkubasi**

Sistem pembinaan kapasitas merupakan elemen kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan kewirausahaan berbasis dampak. Program pembinaan yang efektif harus mencakup pelatihan teknis, manajerial, serta akses terhadap pasar dan teknologi (Sukmara, 2024). Inkubasi bisnis menjadi pendekatan strategis dalam mendukung usaha baru untuk berkembang melalui mentoring, fasilitasi akses pasar, dan penguatan model bisnis. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset dapat mempercepat transfer teknologi dan inovasi (Enas et al.). Dengan sistem pembinaan yang terstruktur, pelaku usaha memiliki kemampuan lebih besar untuk bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif.

Pelatihan teknis harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan konsistensi produksi agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas (Sukmara, 2024). Program pelatihan yang efektif mencakup aspek produksi, pengendalian mutu, serta standar keamanan produk. Selain itu, pembelajaran berbasis praktik dan pendampingan langsung terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan dibandingkan metode teoritis semata (Rahman et al., 2023). Sertifikasi keterampilan

ekanis juga dapat meningkatkan kredibilitas tenaga kerja dan memperluas akses pasar.

Pelatihan manajemen merupakan komponen penting dalam meningkatkan keberlanjutan usaha, terutama bagi UMKM yang menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan bisnis (Sukmara, 2025). Penguatan kapasitas manajerial seperti pembukuan, perencanaan usaha, dan pengelolaan persediaan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, keterlibatan dalam pelatihan manajemen juga terbukti meningkatkan produktivitas melalui peningkatan engagement dan kepuasan kerja (Sulistyo & Sukmara, 2024).

Penguatan sistem kualitas dan sertifikasi menjadi elemen penting agar produk lokal dapat diakui oleh pasar yang lebih luas. Pemerintah dapat memfasilitasi proses sertifikasi atau memberikan subsidi pengujian untuk usaha kecil yang memenuhi standar. Standar kualitas perlu dirancang agar realistis dan relevan dengan permintaan pasar. Fasilitas uji mutu bersama atau laboratorium regional memperkecil biaya bagi produsen kecil. Selain standar teknis, aspek branding dan label kualitas lokal meningkatkan daya tarik produk. Pelatihan tentang manajemen mutu mencakup prosedur pencatatan, standard operating procedures, dan audit internal. Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi dan asosiasi industri membantu mempercepat proses pengakuan pasar. Monitoring kualitas pasca-sertifikasi penting untuk menjaga reputasi produk. Ketika produk lokal mempunyai label yang dipercaya, akses pasar lebih mudah didapatkan.

Akses terhadap teknologi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha lokal di era ekonomi digital (World Bank, 2023). Penggunaan teknologi tepat guna serta digitalisasi proses bisnis dapat membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, literasi digital menjadi prasyarat penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha (Sukmara, 2025).

Model inkubasi harus inklusif sehingga perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dapat mengakses kesempatan peningkatan kapasitas.

Program inkubasi yang fleksibel dari sisi waktu dan lokasi memudahkan partisipasi kelompok yang sibuk atau memiliki kewajiban domestik. Fasilitator termasuk mentor perempuan dan role model lokal membantu memecah hambatan budaya bagi peserta perempuan. Skema beasiswa atau subsidi biaya inkubasi untuk kelompok rentan meningkatkan aksesibilitas. Inkubasi kelompok berbasis komunitas juga bisa memfokuskan pada model usaha kolektif yang relevan dengan sumber daya lokal. Data disaggregated penting untuk memantau inklusi dan menyesuaikan program. Dengan desain inklusif, inkubasi tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis tetapi juga memperbaiki distribusi manfaat.

Pendekatan blended learning menggabungkan sesi tatap muka dan modul online agar pembinaan lebih fleksibel dan hemat biaya. Materi online memungkinkan revisi dan akses berulang oleh peserta. Namun modul online harus ringan dan kompatibel dengan konektivitas daerah yang mungkin terbatas. Sesi tatap muka tetap diperlukan untuk praktik teknis dan mentoring intensif. Platform pembelajaran harus disertai forum diskusi, bank materi, dan akses ke mentor. Pemerintah dan mitra dapat membiayai pengembangan konten lokal yang relevan. Evaluasi blended learning mengukur retensi pengetahuan dan implementasi praktik di lapangan. Dengan kombinasi metode, pembinaan bisa menjangkau lebih luas tanpa mengurangi kualitas.

Jaringan inkubator dan pusat sumber daya regional mempercepat difusi praktik baik dan memberi skala bagi program yang berhasil. Kolaborasi antar-inkubator, universitas, dan sektor swasta memperkaya layanan mentoring dan akses pasar. Pusat sumber daya dapat menampung perpustakaan teknis, laboratorium, dan marketplace lokal. Jaringan juga memfasilitasi pertukaran pengalaman antar-daerah sehingga pelajaran yang berhasil dapat direplikasi. Pemerintah dapat memfasilitasi koordinasi jaringan ini dan menyediakan dukungan operasional awal. Platform digital jaringan mempercepat matching antara pelaku usaha dan pembeli atau investor. Dengan jaringan yang

kuat, inkubasi menjadi lebih efektif dalam mencetak usaha yang tahan pasar.

Monitoring dan evaluasi dari program pembinaan harus fokus pada outcome praktis seperti peningkatan produktivitas, akses pasar, dan pendapatan peserta. Indikator output seperti jumlah peserta penting, tetapi indikator outcome memberi gambaran manfaat ekonomi nyata. Pengumpulan data harus praktis dan dilakukan berkala untuk memetakan perkembangan. Evaluasi kualitatif juga penting untuk memahami hambatan adopsi teknologi atau praktik manajerial. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kurikulum dan strategi pendampingan. Pelibatan pihak ketiga independen menambah kredibilitas evaluasi. Laporan evaluasi harus dibagikan ke pemangku kepentingan agar pembelajaran tersebar. Dengan M&E yang baik, investasi pada pembinaan menghasilkan dampak yang terukur.

Kesimpulannya, sistem pembinaan dan inkubasi yang dirancang pragmatis, inklusif, dan terhubung dengan pasar adalah kunci agar kebijakan perizinan berorientasi dampak berhasil. Integrasi pelatihan teknis, manajemen, kualitas, dan akses teknologi meminimalkan hambatan supply-side. Inkubasi yang dikombinasikan dengan pembiayaan dan akses pasar memperbesar kemungkinan keberlanjutan usaha. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, penyedia fasilitas, dan regulator yang mendukung sinergi. Ketika pembinaan dioperasikan sebagai rangkaian layanan berkelanjutan, pelaku lokal lebih mampu memenuhi persyaratan perizinan dan menumbuhkan kesejahteraan.

### **Mekanisme pendampingan dan jaminan mutu**

Mekanisme pendampingan merupakan elemen operasional yang menghubungkan kebijakan dengan implementasi di lapangan, sehingga kebijakan kewirausahaan berbasis dampak dapat berjalan secara efektif. Peran extension officer, lembaga swadaya masyarakat, dan agregator pasar sangat penting dalam memberikan dukungan teknis,

fasilitasi organisasi, serta akses pasar bagi pelaku usaha lokal (Yoppi & Ading, 2024). Pendampingan yang terstruktur terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha, kualitas produk, serta keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Sukmara, 2026).

Efektivitas extension officer sangat bergantung pada kapasitas teknis, dukungan sarana, serta sistem evaluasi berbasis kinerja. Peran mereka sebagai penghubung antara kebijakan dan pelaku usaha menjadikan mereka aktor kunci dalam proses pemberdayaan ekonomi lokal (Rahman et al., 2023). Selain itu, pendekatan berbasis kompetensi dalam pengelolaan sumber daya manusia terbukti meningkatkan kualitas intervensi dan hasil pendampingan (Sukmara, 2026).

Lembaga swadaya masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan komunitas serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan ekonomi. Keterlibatan LSM dalam fasilitasi sosial, advokasi, dan monitoring kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas program (Bovaird & Löffler, 2021). Selain itu, pendekatan partisipatif yang dilakukan oleh LSM membantu memastikan bahwa kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan (UNDP, 2022).

Aggregator pasar berperan sebagai penghubung antara produsen kecil dan pasar yang lebih luas dengan mengkonsolidasikan volume produksi serta meningkatkan standar kualitas. Peran ini penting dalam memperkuat rantai pasok lokal dan meningkatkan posisi tawar pelaku usaha kecil (World Bank, 2021). Selain itu, kelembagaan seperti koperasi dapat berfungsi sebagai aggregator yang berbasis komunitas sehingga manfaat ekonomi lebih merata (Sukmara, 2025).

Mekanisme pendampingan harus bersifat modular dan berkelanjutan agar layanan dapat menyesuaikan fase pengembangan usaha. Tahapan pendampingan meliputi assessment kebutuhan, pelatihan teknis, coaching lapangan, bantuan pemasaran, dan monitoring hasil. Setiap modul memerlukan indikator kinerja yang jelas agar layanan dapat dievaluasi. Penyedia layanan perlu dilatih untuk menggunakan pendekatan berbasis problem solving agar cepat

menanggapi kendala lapangan. Layanan satu paket memudahkan pelaku usaha untuk mengakses dukungan terpadu tanpa harus berurusan dengan banyak lembaga. Pembiayaan pendampingan bisa bersifat cost-sharing agar ada ownership lokal. Mekanisme evaluasi periodik membantu memperbaiki paket layanan sesuai kebutuhan. Dengan modularitas, pendampingan menjadi relevan dan efisien.

Jaminan mutu merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa produk lokal memenuhi standar pasar dan dapat bersaing secara berkelanjutan. Sistem pengendalian kualitas yang terstruktur, termasuk sertifikasi dan pengujian produk, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar (World Bank, 2021). Selain itu, penguatan manajemen mutu berbasis organisasi terbukti meningkatkan efisiensi dan konsistensi produksi (Saepudin et al., 2024).

Teknologi sederhana menjadi enabler penting dalam mekanisme pendampingan dan jaminan mutu, misalnya penggunaan aplikasi mobile untuk laporan produksi dan quality checklist. Digitalisasi proses monitoring mempercepat identifikasi masalah dan memperkaya data evaluasi. Training on-the-job menggunakan video atau tutorial digital memudahkan pembelajaran berulang. Namun teknologi perlu dipilih sesuai kondisi lokal agar tidak menciptakan hambatan akses. Pemerintah dapat mendukung infrastruktur digital dasar dan literasi agar teknologi dapat dimanfaatkan secara inklusif. Selain itu, platform marketplace lokal dapat dikembangkan untuk mempertemukan pemasok dengan pembeli. Integrasi data antara sistem perizinan, pengadaan, dan monitoring memperkuat sinergi kebijakan. Dengan teknologi yang tepat, biaya pendampingan dan verifikasi dapat ditekan.

Mekanisme pembiayaan pendampingan harus disusun agar layanan berkelanjutan tanpa bergantung pada proyek jangka pendek semata. Model pembiayaan bisa berupa fee-for-service yang terjangkau, matching fund pemerintah, atau alokasi APBD untuk kapasitas layanan. Keterlibatan corporate sebagai co-funder juga bisa menjadi sumber pembiayaan jika ada kepentingan pasar bersama.

Penting juga mengalokasikan dana untuk capacity building penyedia layanan agar kualitas pendampingan meningkat. Audit penggunaan dana pendampingan serta laporan kinerja harus disediakan secara berkala. Pilihan pembiayaan yang beragam membantu menjaga keberlanjutan layanan ketika skema proyek berakhir. Dengan struktur pembiayaan yang jelas, pendampingan bisa menjadi layanan publik jangka panjang.

Mekanisme insentif bagi penyedia pendampingan dapat meningkatkan kualitas layanan dan orientasi pada hasil. Misalnya, pembayaran berdasarkan hasil (results-based payments) kepada extension officer atau agregator yang berhasil meningkatkan indikator kinerja. Insentif ini menuntut adanya verifikasi independen dan baseline yang jelas. Pembayaran berbasis hasil mendorong fokus pada outcome daripada aktivitas belaka. Namun desain insentif harus seimbang agar tidak memicu praktik manipulasi data. Kombinasi antara gaji dasar dan bonus berbasis performa sering memberikan keseimbangan motivasi. Transparansi kriteria insentif penting agar akuntabilitas terjaga. Ketika insentif desainnya tepat, kualitas pendampingan meningkat dan dampak kebijakan lebih terlihat.

Pelibatan komunitas dalam monitoring dan jaminan mutu memperkuat kontrol sosial sehingga klaim kualitas dan manfaat dapat diuji oleh mereka yang terkena dampak langsung. Mekanisme monitoring partisipatif termasuk pelatihan enumerator lokal dan forum evaluasi berkala. Laporan monitoring komunitas harus memiliki kanal resmi untuk dialog dengan pemangku kebijakan. Partisipasi ini juga membantu menumbuhkan rasa kepemilikan atas hasil dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan komunitas menambah kapasitas lokal untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan mandiri. Keikutsertaan komunitas memperkaya bukti evaluasi dengan perspektif kualitatif yang relevan.

Secara keseluruhan, mekanisme pendampingan dan jaminan mutu merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan kewirausahaan daerah berbasis dampak. Integrasi antara dukungan

teknis, penguatan kelembagaan, akses pasar, serta sistem pengendalian mutu akan meningkatkan peluang keberhasilan pelaku usaha lokal dalam memenuhi standar ekonomi yang kompetitif (OECD, 2020; World Bank, 2021). Selain itu, pendekatan yang inklusif dan berbasis pengembangan sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Sukmara, 2025).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bovaird, T., & Löffler, E. (2021). *Public management and governance*. Routledge.
- Enas, H., Sukmara, A. R., Bastaman, I. D., & Tauhid, A. B. (n.d.). *Manajemen kreativitas dan keinovasian*. Cipta Media Nusantara.
- Mazzucato, M. (2021). *Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism*. Penguin.
- OECD. (2020). *Government at a glance 2020*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Policy coherence for sustainable development 2021*. OECD Publishing.
- Rahman, A., Priadana, M. S., & Machmud, S. (2023). *Pengembangan dan pemberdayaan SDM pada sektor transportasi*. Cipta Media Nusantara.
- Saepudin, H., Surjono, W., Rahman, H. A., & SE, M. (2024). *Perilaku organisasi*. Cipta Media Nusantara.
- Sukmara, A. R. (2024). Human resource management to maintain the quality of education. *Jurnal Ekonomi*, 13(03), 1907–1914.
- Sukmara, A. R. (2024). *Manajemen perubahan dan budaya organisasi*. UMUS Press.
- Sukmara, A. R. (2024). The role of human resource management in organizations. *Jurnal Info Sains*, 14(04), 604–610.

- Sukmara, A. R. (2025). *Ekonomi dan bisnis digital*. Selfietera Indonesia.
- Sukmara, A. R. (2025). *Perekonomian global: Isu, kebijakan, dan prospek masa depan*. Cendekia Publisher.
- Sukmara, A. R. (2025). *Perilaku organisasi*. CV. Selfietera Indonesia.
- Sukmara, A. R. (2025). Poverty is caused by low human resources. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(7), 598–607.
- Sukmara, A. R. (2026). The impact of competency-based interviews on employee selection results. *Influence: International Journal of Science Review*, 8(1), 24–29.
- Sukmayadi, S., & Sukmara, A. R. (2024). The effect of transparency and accountability on the quality of village financial reports. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1173–1188.
- Sulistyo, S., & Sukmara, A. R. (2024). Analysis of work discipline and job satisfaction on productivity mediated by employee engagement. *Seascapeid Journal of Economics, Management, and Business*, 1(2), 11–22.
- UNDP. (2022). *Inclusive growth and sustainable development report*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. World Bank.
- World Bank. (2022). *Global economic prospects*. World Bank.
- World Bank. (2023). *Digital development overview*. World Bank.

Yoppi, H. J., & Ading, R. S. (2024). Strategi peningkatan kinerja aparatur terhadap pelaksanaan pengawasan. *Journal of Management and Social Sciences*, 3(4), 112–130.